

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam lima tahun terakhir sedang mengalami percepatan. Capaian pembangunan infrastruktur dari tahun 2014 sampai 2019 terdiri dari pembangunan 15 bandara, 136 pelabuhan, 65 bendungan, sepanjang 3.194 kilometer jalan perbatasan, 1.387 kilometer jalan tol, dan 811,89 kilometer rel kereta api yang tersebar di seluruh penjuru negara. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur ini, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (KSP, 2019).

Hal utama dari percepatan pembangunan adalah peranan perusahaan konstruksi. Tercatat hingga Agustus 2019 terdapat 138.380 badan usaha konstruksi yang terdiri dari 96% kontraktor umum dan 4% sisanya adalah spesialis. Kontraktor umum merupakan perusahaan konstruksi dengan kualifikasi kecil hingga menengah, sedangkan spesialis merupakan perusahaan konstruksi dengan kualifikasi besar. Pembagian kualifikasi tersebut ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha, salah satunya yaitu berdasarkan kekayaan bersih perusahaan. Kekayaan bersih untuk kualifikasi kecil bernilai lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah (terbagi ke dalam subkualifikasi K1, K2, dan K3), kualifikasi menengah memiliki kekayaan bersih paling sedikit 500 juta rupiah sampai 2 milyar rupiah (terbagi ke dalam sub kualifikasi M1 dan M2) serta untuk kualifikasi besar memiliki kekayaan bersih paling sedikit 10 milyar rupiah sampai 50 milyar rupiah yang terbagi ke dalam sub kualifikasi B1 dan B2 (LPJKN, 2019).

Kekayaan bersih perusahaan konstruksi dibutuhkan sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Modal tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan yang waktu penyelesaiannya membutuhkan satu atau lebih dari satu periode akuntansi. Setelah pekerjaan selesai, perusahaan baru bisa menerima pendapatan atas pekerjaan tersebut. Pada perusahaan konstruksi setiap pekerjaan atau proyek memiliki perjanjian kerja sama yang dikenal dengan kontrak konstruksi. Di dalam kontrak konstruksi berisi beberapa komponen di antaranya, pihak yang terkait dengan perjanjian, harga pelaksanaan, jangka waktu perjanjian, dan mekanisme pembayaran pekerjaan. Dari kesepakatan kontrak tersebut perusahaan dapat mengetahui berapa pendapatan yang akan diterima hingga kontrak selesai.

PT Mitra Sarana Karya Bangsa (Miska) sebagai perusahaan konstruksi yang baru berdiri selama tiga tahun, memerlukan penghitungan dan perlakuan yang tepat untuk menyikapi pendapatan agar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Penghitungan ini berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung perusahaan selama mengerjakan proyek sampai dengan selesai. Kebijakan yang tepat juga bermanfaat agar penyajian pendapatan di dalam laporan keuangan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga laba atau rugi yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi dapat diungkapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PT Miska merupakan badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi M (menengah). Perusahaan ini telah memiliki SBUJK yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi DKI Jakarta dan tergabung dalam asosiasi Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia). Selama tahun 2019 PT Miska menerima proyek perkuatan tower (*strengthening*) dan *Colocation* dari dua klien yang berbeda. Proyek perkuatan tower merupakan pekerjaan yang dilakukan PT Miska atas permintaan PT DMT yaitu sebanyak 56 *site* tower yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan untuk proyek *Colocation* merupakan permintaan PT IBS yaitu sebanyak 11 *site* tower di daerah Jabodetabek. Nilai dari kedua proyek tersebut mencapai tiga milyar rupiah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan ini memiliki pengukuran dan penghitungan yang tepat atas pendapatan kontrak konstruksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji terkait pendapatan jasa konstruksi sebagai bagian laporan akhir dengan judul “Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Kontrak Konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kontrak konstruksi perkuatan tower dan *Colocation* pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pendapatan kontrak konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa?
3. Bagaimana kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi atas pendapatan kontrak konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Menguraikan prosedur pelaksanaan kontrak konstruksi perkuatan tower dan *Colocation* pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.
2. Menguraikan perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pendapatan kontrak konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.
3. Menguraikan kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi atas pendapatan kontrak konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) khususnya di dalam perlakuan akuntansi bidang jasa konstruksi.
2. Bagi PT Mitra Sarana Karya Bangsa
Hasil penulisan Laporan Akhir ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi PT Mitra Sarana Karya Bangsa untuk melakukan pembukuan yang sesuai dan dibutuhkan atas pendapatan konstruksi perusahaan. Manfaat lainnya yaitu sebagai bahan evaluasi dan koreksi atas kebijakan perusahaan selama periode akuntansi berlangsung.
3. Bagi Pembaca
Laporan Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya terhadap perlakuan pendapatan kontrak konstruksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

